

Siaran Pers Komnas Perempuan

Penegasan Komitmen Negara dan Bangsa untuk Memenuhi Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dan Pemajuan Kepemimpinan Perempuan

Jakarta, 30 November 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menerima laporan Komnas Perempuan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam empat dasawarsa sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Kehadiran Presiden pada puncak perayaan 10 tahun keberadaan Komnas Perempuan ini penting untuk meneguhkan dukungan Negara pada perempuan korban kekerasan dan perjuangannya. Komnas Perempuan menegaskan bahwa para korban mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam perjuangan untuk menggapai keadilan dan kesejahteraan dan terus menghadapi stigma yang merongrong daya pulihnya, sementara sistem hukum yang adil bagi perempuan masih belum tersedia. Perayaan 10 tahun Komnas Perempuan bertema “Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa” dan melibatkan puluhan perempuan korban kekerasan dari berbagai situasi konflik di Indonesia yang berlangsung selama lebih empat dekade, antara lain: perempuan korban peristiwa 1965, konflik di Aceh, Papua, Maluku, Poso, kerusuhan Mei 1998, dan terkait serangan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Pertemuan ini juga dihadiri lebih dari 300 pembela HAM, tokoh gerakan demokrasi, dan anggota masyarakat yang peduli. Hadir pula sejumlah perempuan pembela HAM dari 14 negara di Asia, selain perwakilan dari Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa dan perwakilan Komnas HAM Korea dan Indonesia.

Tujuan acara ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen negara dan bangsa Indonesia dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pemajuan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden RI diharapkan memberikan komitmen pemerintah untuk merawat sejarah bangsa, yaitu dengan melengkapi penulisan dan pengajaran sejarah Indonesia sesuai temuan-temuan mutakhir tentang kepemimpinan perempuan serta pengalaman kekerasan terhadap perempuan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Presiden dapat mengajak setiap elemen bangsa untuk memberikan kesempatan bicara yang seluas-luasnya kepada para perempuan korban guna menemukan pokok-pokok kebenaran yang menjadi landasan membangun pemahaman bersama untuk membebaskan Indonesia dari kekerasan, sampai ke akar-akarnya. B.J. Habibie, Presiden RI pada tahun 1998-1999 dan pendiri Komnas Perempuan, juga akan menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan adalah prasyarat mutlak bagi demokratisasi di Indonesia. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan hanya bisa diperoleh bila kekerasan terhadap perempuan tidak lagi menjadi kendala bagi peran aktif perempuan sebagai warga dan stigma ”gerwani” tidak lagi dilancarkan untuk menghalang-halangi peran perempuan dalam politik.

Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, menyatakan bahwa, dalam perjumpaan Komnas Perempuan dengan para korban kekerasan, “kami menemukan sosok-sosok perempuan yang, di tengah kesakitannya, berdiri tegak, bersikap tegar, dan berhati besar Tanpa peran setiap perempuan korban yang berbicara tentang pengalamannya, bangsa Indonesia tidak akan bisa memperoleh pemahaman yang sepuh-penuhnya dan sejujur-jujurnya tentang perjalanan sejarahnya sendiri.” Komnas Perempuan berharap Presiden menegaskan adanya upaya khusus untuk membangun hukum yang adil dan peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan serta menjamin pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Sylvana Maria Apituley, menegaskan komitmen dan kepeloporan warga bangsa dalam mengatasi persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia. Ia menyatakan bahwa “perempuan dan warga bangsa tidak pernah diam di hadapan kekerasan dan diskriminasi Kepeloporan dan keteguhan gerak para warga bangsa berdiri di atas kemandirian warga Indonesia dan berakar pada kedaulatan rakyat.” Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mengajak setiap elemen bangsa untuk terlibat dalam gerakan “Mari Bicara Kebenaran”. Gerakan ini dimaksudkan untuk membuka ruang-ruang dialog yang tulus dan bersahabat bersama perempuan korban kekerasan. Melalui gerakan ini, bangsa Indonesia diharapkan dapat bersama-sama menatap masa lalunya – dalam kejatuhan dan kebangkitannya – demi membangun Indonesia yang bebas dari kekerasan. Sirih pinang dipilih sebagai lambang gerakan “Mari Bicara Kebenaran” karena peran sentralnya dalam tradisi masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, khususnya sebagai sarana untuk memberi tawaran persahabatan dan ikatan rasa saling percaya.